



RENJA 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR**



MELAYANI DENGAN PRIMA

Alamat :
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar



(0752) 574715



08116616149



www.pmpstsp.tanahdatar.go.id



1708



dpmpstspstanahdatar@gmail.com



dpmpstspstanahdatar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridhanya maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dirasa perlu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merumuskan Rancangan Rencana Kerja untuk menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi pada tahun 2026. Keberhasilan ini akan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah perencanaan yang baik.

Perumusan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar ini masih jauh dari apa yang diharapkan, oleh karenanya sangat diharapkan sekali kritikkan dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Batusangkar, Agustus 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOPA NOFA BUDIANTO,SH
NIP. 19740612 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD..... 7

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 20

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PMPTSP 23

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD..... 27

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD 41

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 41

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026..... 47

BAB V PENUTUP 48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun. Renja OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun perencanaan tahunan yang bersumber dananya dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Disamping itu Renja OPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi seluruh Aparat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya sehingga target Kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan Baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 ini dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan Strategis yang perlu ditindak lanjuti atau di antisipasi.

Dengan adanya Rencana kerja ini maka seluruh proses kegiatan pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan Sistem yang jelas dan terukur, baik dari segi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai pedoman perencanaan program/ kegiatan tahun 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis di Kabupaten Tanah Datar guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan Pembangunan, kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Priode 2021-2026

dan hasilnya dari proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

2. Perencanaan Kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan target kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
3. Secara Umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.
4. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan Program Kegiatan ke dalam KUA PPAS dan Perencanaan Program kegiatan yang akan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (TC 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (2025)
KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6			7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan system pelaporan kinerja														
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	8	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen	
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	6	dokumen	6	Dokumen			100%	6	Dokumen	6	dokumen	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	3	dokumen	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan system pelaporan														
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang/B ulan	41	Orang	41	Orang	33	Orang	100%	41	Orang	41	Orang	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang sudah megikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya														
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket												
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	7	Orang	2	Orang			100%	2	Orang	2	Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)				Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	3	Paket	3	Paket			100%	10	Paket	10	Paket	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket			14	Paket	14	Paket				14	Paket	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	23	Paket	26	Paket	26	Paket	100%			26	Paket	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	9	Paket	6	Paket	6	Paket	100%			6	Paket	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%			24	Dokumen	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%			12	Laporan	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%			12	Laporan	
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000	Dokumen												
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem Informasi Pendukung MPP)	45000	Dokumen												
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (kendaraan roda 4)	4	Unit												
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1	Unit								1	Unit	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	Unit	4	Unit								4	Unit	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)				
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang Ditata														
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan												
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	11	Unit	8	Unit	8	Unit	100%	11	Unit	11	Unit	
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	Unit												
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100%	1	Tahun	1	Tahun	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan pembayaran honor Tenaga Jasa Lainnya	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	2	Unit	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif													
2	18	02	2.01		Penetapan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang Disusun													
2	18	02	2..01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen											
2	18	02	2..01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen											
2	18	02	2..01	04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5	Dokumen											
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang Disusun													
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen											
2	18	02	2.02	04	Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen					1	Dokumen	1	Dokumen	
2	18	02	3.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota														
2	18	02	3.04	01	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Badan Usaha											
2	18	02	3.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	02	3.06	01	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Laporan												
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah														
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan/Diikuti														
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1	Kegiatan	1	Kegiatan	2	Kegiatan	200%	1	Dokumen	1	Dokumen	
2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal kab/kota	1	Dokumen												
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang Dilaksanakan														
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Dilaksanakan														
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota	1000	Pelaku Usaha	1	Tahun					100%	1	Tahun	1	Tahun	
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500	Kegiatan Usaha	1	Tahun	1	Tahun	1	tahun	100%	1	Tahun	1	Tahun	
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12	Orang	4	Orang	12	Orang	32	orang	266,67%	12	Orang	12	Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	04	2.01	08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	350	Kegiatan Usaha	271	Kegiatan Usaha	170	Kegiatan Usaha	165	Kegiatan Usaha	97,06%	170	Kegiatan Usaha	170	Kegiatan Usaha	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan														
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku usaha dalam Melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8	Kegiatan usaha			11	Kegiatan Usaha	11	Kegiatan Usaha	100%					
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	120	Pelaku Usaha	376	Pelaku Usaha	325	Pelaku Usaha	540	Pelaku Usaha	166,15 %	560	Pelaku Usaha	560	Pelaku Usaha	
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	120	Kegiatan usaha	71	Kegiatan usaha	20	Kegiatan usaha	135	Kegiatan Usaha	675%	17	Kegiatan usaha	17	Kegiatan usaha	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Disusun														
2	18	06	2.01		Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (N-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2025)					
											Target Renja Perangkat Daerach Tahun (n-2) Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2024			Tingkat Realisa si (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	4	DOkumen	133,3%	2	Dokumen	2	Dokumen		

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sepanjang Tahun 2024

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1) KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Penyusunan Dokumen Renja dan Renja Perubahan, penyusunan RKA, DPA, RKA dan DPA Pergeseran, RKAP dan DPPA
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Output dari kegiatan ini adalah Laporan Kinerja (LkjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2023. Pembuatan laporan-laporan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habis tahun berjalan (setelah 31 Desember 2023), semua laporan telah dapat diselesaikan.

2) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi kegiatan ini berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 33 Orang.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan laporan keuangan juga serupa dengan laporan kinerja, dibuat setelah 31 Desember 2023. Mulai tanggal 5 Januari 2024 telah mulai dilakukan pengumpulan bahan dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023

3) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Realisasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung kantor Dinas PMPTSP dan Mal Pelayanan Publik (MPP) terpenuhi dan berfungsi dengan baik

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini berupa pembelian Kabel Protector 54 Batang, RJ45 100 pcs, Switch Hub 8 Port 5 Unit, Kursi Roda 1 Unit, AC 5 Unit, Braket TV 2 Unit, Dispenser 2 Unit, TV LED 43 Inch 2 Unit, TV 75 Inch 2 Unit, Vertikal Blind 2 Set, Kabel LAN

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Dinas PMPTSP Kabupaten Tanah Datar terpenuhi dengan baik.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, berupa cetak dan penggandaan terpenuhi dengan baik

5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk Dinas PMPTSPN maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik

6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana dengan baik

4) PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Realisasi Kinerja sesuai dengan target yaitu pengadaan mebel untuk Mal Pelayanan Publik

2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Realisasi kegiatan ini sesuai dengan target yaitu pengadaan 3 buah Mouse, 3 Unit Penyimpanan Eksternal, 17 Unit Komputer PC, 3 Unit Laptop, 2 Unit Tablet, 3 Unit Monitor PC, 2 Unit Printer Thermal

5) PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancar.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Realisasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana selama 1 tahun, serta pembayaran honor 4 (empat) orang tenaga jasa lainnya.

6) PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional atau lapangan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua dan semua pajak kendaran dinas baik roda empat maupun roda dua telah dibayar lunas dan tepat waktu serta pembayaran 1 orang tenaga jasa lainnya.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Realisasi kinerja sesuai dengan target, terealisasi berupa pemeliharaan peralatan kantor 1 Unit AC dan 1 Unit CPU

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Realisasi kinerja sesuai dengan target, rehap gedung PMPTSP dan berupa Pembayaran Honor 2 (dua) Orang tenaga jasa lainnya.

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

kegiatan ini terlaksana sebagai berikut

- Mengikuti kegiatan Pameran Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Expo tahun 2024 di *Main Lobby Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC)* Senayan Jakarta pada tanggal 06 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
- Mengikuti kegiatan Pameran APKASI Otonomi Expo 2024 (AOE 2024) di Hall A dan B Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada tanggal 10 – 12 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
- Menyusun dokumen berupa buku yang dapat menunjang kegiatan promosi :
 1. Buku direktori potensi penanaman modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2024.
 2. Buku segmentasi data penanaman modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2023.
 3. Buku kajian pra-kelayakan hilirisasi tanaman aren di Andaleh Baruah Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PELAYANAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Kegiatan ini terealisasi berupa

- Terasilitasinya penerbitan izin dan non izin sebanyak 35.662 izin

- Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Layanan Perizinan Terpadu (PRN)
 - Pembayaran Honorarium 8 (delapan) orang Tenaga Jasa Lainnya
2. Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Realisasi kegiatan ini berupa memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait pembangunan kandang ayam di Nagari Batu Bulek Kecamatan dan pengaduan terkait kinerja petugas pelayanan, memfasilitasi konsultasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui WhatsApp sebanyak 30 konsultasi
 3. Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Realisasi kegiatan ini berupa melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan perizinan dan Non Perizinan terhadap 165 pelaku usaha.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
Realisasi kegiatan ini berupa memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kabupaten Tanah Datar terhadap 11 (sebelas Pelaku/ Kegiatan Usaha).
2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Realisasi kegiatan ini berupa penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap 540 (lima ratus empat puluh) Pelaku Usaha yang dibagi kedalam 10 (sepuluh) angkatan pelatihan
3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
Realisasi kegiatan ini berupa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap 135 (seratus tiga puluh lima)

Kegiatan Usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Tanah Datar

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1) KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Realisasi kegiatan ini berupa

- Penyelesaian Dokumen Pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Peraturan Kepala Daerah, Perjanjian Kerjasama, Keputusan Bupati)
- Penyebarluasan informasi pelayanan perizin izin usaha melalui Baliho, Spanduk, Banner
- Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berupa survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu meningkat sangat signifikan dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik pada sasaran OPD, Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif

Faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan yaitu antara lain :

- 1) Adanya komitmen dan maklumat pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas syaratnya, jelas tarifnya dan jelas waktu penyelesaiannya.
- 3) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai standar prosedur penyelesaian izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4) Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan OPD teknis terkait.

Tabel 2.2 (TC 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PMPTSP Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Nilai Investasi			141,7 M	146,7M	151,7 M	156,7 M	219,17M	231,9 M	220 M	225 M	
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten			3,50	3,50	3,50	3,50	154,67	158,13	140,40	143,58	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			84	86	88	91	88,36	90,59	95	95	
4	Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mall Pelayanan Publik			5	8	10	12	0	15	20	20	
5	Nilai SAKIP perangkat daerah			BB (71)	BB (75)	BB (80)	A (91)	BB (70,95)	74,25	80	81	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Invetasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Realisasi Investasi dapat meningkat karena adanya penambahan Investasi oleh pelaku usaha baru dan adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk melaporkan penambahan investasinya melalui Sistem LKPM serta adanya kebijakan pemerintah dalam hal penyederhanaan aturan terkait dengan investasi. Hal tersebut dapat terlihat dari target investasi kita sebesar Rp. 146.700.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.231.977.032.017,-

2. Persentase Peningkatan Investasi di Tanah Datar

Dengan terealiasinya Investasi sebesar Rp. 231.977.032.017,- maka untuk persentasi peningkatan Investasi sebesar 158,13%

3. Indek Kepuasan Masyarakat

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat penilaiannya dalam kategori B dengan Kinerja Unit Pelayan Baik. Ini dapat ditunjukan oleh nilai SKM konversi sebesar 90,59. Adapun capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan perizinan pada dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan tahun 2024, sebagai berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai Rata-rata PerUnsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
U1	Persyaratan	3.5254	B	Baik
U2	Prosedur pelayanan	3,5593	A	Sangat Baik
U3	Waktu pelayanan	3,4576	B	Baik
U4	Biaya/ Tarif	3,9153	A	Sangat Baik
U5	Produk Layanan	3,5763	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,5508	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,5847	A	Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,5847	A	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan	3,8898	A	Sangat Baik
	NILAI IKM	90,59	A	Sangat Baik

namun demikian untuk tahun berikutnya kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan perlu ditingkatkan pada unsur pelayanan yang nilainya masih kurang dan mempertahankan nilai yang cukup tinggi

4. Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik

Untuk Tahun 2024 jumlah Instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik dari Target 10 OPD sudah terealisasi sebanyak 15 OPD yang terdiri dari 7 (tujuh) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan 2 (dua) dari BUMN/BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Nagari serta 6 (enam) dari Instansi Vertikal yang bergabung yaitu Samsat, Polres Tanah Datar, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, KP2KP Pajak Batusangkar, Kantor Pertanahan ATR/ BPN atau dengan Capaian Kinerja 150 %

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas tergambarkan bahwa penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bernilai BB (Sangat Baik) dengan nilai (74,25) dari yang ditargetkan BB (72) dan untuk masa yang akan datang masih diperlukan perbaikan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PMPTSP

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar terdapat isu- isu penting yaitu :

1. Melayani dengan PRIMA (Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani dan Atraktif)

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu unit kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang memberikan pelayanan dengan PRIMA kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas Aparatur

Ketersediaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, jumlah aparatur harus memadai

dan memenuhi persyaratan kompetensi. Oleh sebab itu perlu upaya dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas serta perlu penambahan jumlah aparatur.

3. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif

Dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal/investasi di Kabupaten Tanah Datar perlu diciptakan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.

4. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang penanaman modal, menjadi informasi awal bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal serta eksplorasi potensi unggulan dan strategis untuk pengembangan lebih lanjut

5. Belum adanya peta investasi yang komprehensif dan lengkap

Peta potensi investasi harus disusun mengacu kepada kondisi dan potensi yang terbaru dengan memanfaatkan digitalisasi sehingga lebih komprehensif, menarik dan lengkap

6. Melahirkan regulasi daerah yang menciptakan daya saing daerah di bidang investasi dengan memberikan insentif dan kemudahan investasi.

7. Optimalisasi promosi investasi

Promosi investasi merupakan kegiatan strategis untuk mengenalkan dan menawarkan peluang investasi daerah kepada calon-calon investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Datar. Promosi investasi dapat dilakukan melalui kegiatan pameran investasi, temu bisnis maupun memanfaatkan media-media informasi dan pihak-pihak yang punya jangkauan nasional dan internasional

8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

Masih kurang dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib penanaman modal dan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan fasilitasi investasi dan pelayanan prima perizinan maka ketersediaan

- sarana dan prasarana pendukung merupakan hal yang perlu menjadi perhatian.
9. Informasi pemanfaatan ruang belum dapat diakses oleh pelaku usaha dengan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detil.
 10. Masih minimnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, ruang multimedia, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan.
 11. Belum optimalnya layanan sistem satu pintu
Untuk memaksimalkan layanan satu pintu dibutuhkan koordinasi dengan instansi teknis, khususnya tim teknis layanan perizinan secara intensif. Oleh karena itu diperlukan penempatan tim teknis layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar, sehingga sistem pengkoordinasian dengan perangkat daerah teknis menjadi efektif dan efisien.
 12. Masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas suatu usaha yang masih perlu dioptimalkan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya perizinan berusaha dan non berusaha di Kabupaten Tanah Datar.
 13. Pengembangan aplikasi Sipintar yang digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dengan pengembangan aplikasi ini, maka seluruh penyelenggaraan perizinan non berusaha yang kewenangannya sudah dilimpahkan ke Dinas PMPTSP dapat diakomodasi dalam aplikasi perizinan. Dengan aplikasi *online* ini diharapkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perizinan tidak harus ke Dinas PMPTSP, namun dapat melakukannya secara *online*, sehingga dipantau status permohonannya. Sedangkan untuk menghindari dari kemungkinan adanya pemalsuan, maka setiap produk perizinan dilengkapi dengan *barcode* atau *QR Code*. Hal tersebut bisa dicapai nantinya dengan dukungan penuh dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar
 14. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) bahwa pelaksanaan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi secara elektronik. Melalui OSS pelaku

usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya terjadinya permasalahan di dalam pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan yang dilakukan pada Mal Pelayanan Publik karena keterbatasan sarana dan SDM / personil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Persetujuan/ keputusan teknis merupakan kunci terhadap dikabulkan/ ditolaknya permohonan perizinan oleh Tim Teknis. Namun hal ini sepertinya tidak dianggap penting oleh Pemerintah Daerah jika dilihat dari anggaran yang disediakan untuk proses persetujuan/ keputusan teknis tersebut

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Adanya komitmen dan maklumat pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas syaratnya, jelas tarifnya dan jelas waktu penyelesaiannya.
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai standar prosedur penyelesaian izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Terlaksananya koordinasi yang intensif dengan OPD teknis terkait.

INOVASI YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Untuk mendukung dan menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat Inovasi sebagai berikut:

1. SiPINTAR 2.0
2. PETIK BUAH KECAPI (Pelayanan Klinik LKPM bagi Pelaku Usaha untuk Kejar capaian realisasi Investasi)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan rancangan awal pada renstra dengan analisis kebutuhan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Pembandingan antara rencana awal sesuai dengan Renstras dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal sesuai dengan Resntra dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan untuk melaksanakan 6 (enam) Program 15 (lima belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.12.736.458.930,- dan dalam rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar merencanakan melaksanakan 6 (enam) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.530.718.637,- Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:

Tabel 2.4.(T-C 3.1)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Tanah Datar

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.736.458.930						4.530.718.637	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.386.458.930	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.777.320.237	
	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja	100%	39.000.000	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja	100%	4.128.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	Tersusnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	Tersusnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tanah Datar	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusunan dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD yang disusun	6 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tanah Datar	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD yang disusun			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	Tersedianya laporan capaian kinerja an ikhtisar reasliasi kinerja SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusuunan laporan capaian kinerja an ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	Tersedianyan laporan capaian kinerja an ikhtisar reasliasi kinerja SKPD dan laporan hasil koorinasi penyusuunan laporan capaian kinerja an ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	628.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	5.325.958.930	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	3.340.378.093	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang	5.313.958.930	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Datar	Tersedianya gaji an tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang	3.338.878.093	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD an laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD an laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya	100%	210.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya			
	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah Datar	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	60 Paket	60.000.000	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah Datar	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah Datar	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah Datar	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					501.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah					47.727.420	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Tanah Datar	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/	20 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Tanah Datar	Tersedianya komponen instalasilistrik/pener	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ penerangan	10 Paket	3.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bangunan Kantor			penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			Penerangan Bangunan Kantor		angan bangunan kantor	Bangunan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Datar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket/ Pendukung MPP(CCTV)	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Datar	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Datar	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Datar	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	6.227.420	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tanah Datar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tanah Datar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	7.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tanah Datar	Tersedianya bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	30 Dokumen	16.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tanah Datar	Tersedianya bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	Terlaksanakan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	Terlaksanakan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

NO	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem	45000 Dokumen	20.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tanah Datar	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem Informasi Pendukung MPP)			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	1.330.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (kendaraan roda 4)	2 Unit Kendaraan Roda 4, 2 Unit Kendaraan Roda 2	980.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (kendaraan roda 4)			
	Pengadaan Mebel	Tanah Datar	Tersedianya mebel	Penyediaan Mebel	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Tanah Datar	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya baru yang disediakan	Laptop (3 unit), Personal Computer (8 Unit) dan, Printer (10 set)	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya baru yang disediakan			
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah sarana pendukung yang disediakan									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Cakupan administrasi umum perkantoran yang ditata	100%	370.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Cakupan administrasi umum perkantoran yang ditata	100%	234.171.524	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tanah Datar	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tanah Datar	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	500.000	

NO	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Datar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Datar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa peralatan an perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Pembayaran Honor Tenaga Jasa Lainnya	12 Laporan, 4 THL	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Datar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan, 4 THL	108.671.524	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					610.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.915.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianya jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak an perizinan kenaraan dinas poperasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honorarium tenaga jasa lainnya	8 Unit Kendaraan (5 Unit roda 4, 3 unit roda 2), dan 1 THL	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Tanah Datar	Tersedianya jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak an perizinan kenaraan dinas poperasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honorarium THL	8 Unit Kendaraan (5 Unit roda 4, 3 unit roda 2), dan 1 THL	95.538.400	
	Pemeliharaan Mebel	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Terlaksanya pemeliharaan peralatan an mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara	25 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Datar	Terlaksanya pemeliharaan peralatan an mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara	25 Unit	1.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan pembayaran honor tenaga jasa lainnya	2 Unit, 2 Orang THL	250.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Datar	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan pembayaran honor THL	2 Unit, 2 Orang THL	54.376.800	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang konduusif	100%	1.400.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	100%	5.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen	575.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Tanah Datar	Ditetapkan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	250.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Tanah Datar	Ditetapkan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya	Tanah Datar	Ditetapkan rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang	5 Dokumen	250.000.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya	Tanah Datar	Ditetapkan rekomendasi kebijakan sektor usaha yang	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya			

NO	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun	100%	650.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun			
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersusunnya peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten /kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersusunnya peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten /kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota			
	Penyediaan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	450.000.000	Penyusunan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota			
	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota					75.000.000	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota						
	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Badan Usaha	75.000.000	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Tanah Datar	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.					100.000.000	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota						

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							a.						
	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.		Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.		Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan			
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah	100%	650.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah	100%	180.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan/ diikuti	100%	650.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan/ diikuti	100%	180.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten /kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	5 Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten /kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	5 Dokumen	180.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tanah Datar	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tanah Datar	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang	100%	1.450.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	520.960.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				dilaksanakan									
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	1.450.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	520.960.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tanah Datar	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tanah Datar	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota			
	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	4000 Pelaku Usaha	850.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	1000 Pelaku Usaha	507.160.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	75 Pelaku Usaha	250.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	6 Pelaku Usaha	1.8000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten KOTA bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	200 Kegiatan Usaha	200.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tanah Datar	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten KOTA bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	20 Kegiatan Usaha	12.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	650.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	44.438.400	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota		650.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota		44.438.400	
	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya	Tanah Datar	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	10 Kegiatan Usaha	100.000.000	Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya	Tanah Datar	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 Kegiatan Usaha	11.500.000	
	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Tanah Datar	Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha	300 Pelaku usaha	300.000.000	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Tanah Datar	Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha			

NO	Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko						berbasis risiko			
	Pengawasan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya analisa dan Verifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	120 Kegiatan Usaha	250.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Tanah Datar	Terlaksananya analisa dan Verifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	8 Kegiatan Usaha	32.938.400	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun	100%	200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun	100%	3.000.000	
	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	2 Kegiatan	200.000.000	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Kegiatan	3.000.000	
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data	Tanah Datar	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan	2 Dokumen	200.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan	Tanah Datar	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	3.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik		berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik		berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			

Sesuai analisis kebutuhan Rencana Kerja terdapat beberapa sub kegiatan yang anggarannya dikurangi dari pagu Rancangan Awal Rencana Kerja, hal ini terjadi karena Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerah. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Nagari, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Tanah Datar hingga tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang yang telah di usulkan melalui Aplikasi SIPD oleh pihak Nagari/ Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar. Usulan tersebut akan diteruskan ke OPD terkait untuk dilakukan Penyusunan Renja OPD tersebut. Namun untuk Tahun 2026 tidak terdapat usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan perizinan terpadu merupakan pelayanan publik juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan sebagai berikut

Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah”.

Berdasarkan visi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan mendukung **Misi Kelima** “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.*

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 yaitu :

- 1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
- 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif

Berdasarkan tujuan di atas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar menetapkan Sasaran Renja tahun 2026 sebagai berikut:

N o	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	KINERJ A
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif	Jumlah Nilai Investasi	156,7 M
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Mal Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91
				Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik	12
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (91)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemilihan program dan kegiatan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan Pembangunan dan mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- 1) Meningkatkan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi;
- 3) Meningkatkan Produksi dan Produktifitas serta Nilai Tambah Hasil Pertanian;
- 4) Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Unggulan Daerah;

- 5) Meningkatkan Kualitas SDM;
- 6) Meningkatkan Infrastruktur Daerah, Penanggulangan Bencana Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas;

Dari tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 ada 2 Prioritas yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas.

Untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan. Adapun prioritas program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- Program : 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**
- Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

- Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program : 2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- Kegiatan : 1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Program : 3. Promosi Penanaman Modal**
- Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Program : 4. Pelayanan Penanaman Modal**
- Kegiatan : 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik
 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko

Program : 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan : 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya
 - Pengawasan Penanaman Modal

Program : 6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan : 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Pada Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar mempunyai 6 (Enam) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan sebagaimana daftar terlampir

BAB V

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun sebagai pedoman rencana kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2026.

Untuk keberhasilan Rencana Kerja tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan program unggulan bupati yang terkait dengan Investasi dan pelayanan perizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat, dan akurat.

Rencana Kerja merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2026.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati perkenankan kami untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas semua dukungan moral dan materil kepada semua pihak (seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan dan satuan kerja terkait), sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, Amin ya robbal‘alamin.

Batusangkar, Agustus 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYIFA NOFA BUDIANTO,SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Tabel T-C 33

					RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026										
					PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR										
					Tahun Perencanaan : 2026										
Nama Organisasi					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan															
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikaif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2		3		4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.530.718.637				10.562.458.930
					URUSAN PENANAMAN MODAL						4.530.718.637				10.562.458.930
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.777.320.237					7.387.458.930
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja		100%	4.128.000					39.000.000
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Datar	8 Dokumen	3.500.000					12.000.000
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD yang disusun	Tanah Datar							15.000.000
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianyan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanah Datar	3 Laporan	628.000					12.000.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan		100%	3.340.378.093					5.325.958.930
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tanah Datar	30 Orang/ bulan	3.338.878.093					5.313.958.930
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tanah Datar	2 Laporan	1.500.000					12.000.000
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya		100%	-					120.000.000
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Tanah Datar	60 Paket						60.000.000
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tanah Datar	50 orang						60.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					47.727.420					584.500.000
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tanah Datar	10 Paket	3.000.000					30.000.000
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanah Datar	1 Paket / Pendukung MPP (CCTV)						150.000.000
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tanah Datar	20 paket	6.227.420					70.000.000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tanah Datar	10 paket	7.000.000					70.000.000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tanah Datar	30 Dokumen						19.500.000
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tanah Datar	12 Laporan	1.500.000					70.000.000
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Datar	12 Laporan	30.000.000					150.000.000
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Datar	1000 Dokumen						10.000.000
2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Sistem Informasi pendukung MPP)	Tanah Datar	45000 Dokumen			untuk pendukung MPP			15.000.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	-					500.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikaif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (kendaraan roda 4)	Tanah Datar	2 Unit Kendaraan roda 4, 2 unit roda 2					300.000.000
2	18	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tanah Datar	1 Unit			untuk pendukung		100.000.000
2	18	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya baru yang disediakan	Tanah Datar	Laptop (3 Unit), Personal Computer 8 Unit) dan					100.000.000
2	18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan administrasi umum perkantoran yang ditata		100%	234.171.524				348.000.000
2	18	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Datar	12 Laporan	500.000				13.000.000
2	18	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tanah Datar	12 Laporan	125.000.000				160.000.000
2	18	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan an perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanah Datar	12 Laporan					25.000.000
2	18	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tanah Datar	12 Laporan, 4 THL	108.671.524				150.000.000
2	18	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.915.200				470.000.000
2	18	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Tersedianyan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honorarium THL	Tanah Datar	8 Unit Kendaraan (5 Unit roda 4, 3 unit roda 2), 1	95.538.400				250.000.000
2	18	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Tanah Datar	15 Unit					50.000.000
2	18	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihora	Tanah Datar	25 Unit	1.000.000				70.000.000
2	18	01	2.09	0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi geung kantor an bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan pembayaran honor THL	Tanah Datar	2 Unit, 2 Orang THL	54.376.800				100.000.000
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif		100%	5.000.000				700.000.000
2	18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Potensi Pengembangan Penanaman Modal yang disusun		1 Dokumen	5.000.000				400.000.000
2	18	02	2.01	0001		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Tanah Datar	1 Dokumen	5.000.000				100.000.000
2	18	02	2.01	0003		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Tanah Datar	1 Dokumen					100.000.000
2	18	02	2.01	0004		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tanah Datar	5 Dokumen					200.000.000
2	18	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Cakupan Peta Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun		100%	0				300.000.000
2	18	02	2'02	0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten /kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	1 Dokumen					150.000.000
2	18	02	2.02	004		Penyusunan peta potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Tersusunnya peta potensi investasi kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	1 Dokumen					150.000.000
2	18	02	3.04			Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota					-				100.000.000
2	18	02	3.04	0001		Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		1 Badan Usaha					100.000.000
2	18	02	3.06			Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.					-				100.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikaif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	02	3.06	0001		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan		1 Laporan					100.000.000
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah		100%	180.000.000				450.000.000
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan/diikuti		100%	180.000.000				450.000.000
2	18	03	2.01	0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten /kota	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten Kota	Tanah Datar	5 Dokumen	180.000.000				300.000.000
2	18	03	2.01	0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Tanah Datar	1 Dokumen					150.000.000
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan		100%	520.960.000				800.000.000
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan		100%	520.960.000				800.000.000
2	18	04	2.01	0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah kewenangan daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Tanah Datar	3 Dokumen					150.000.000
2	18	04	2.01	0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	4000 Pelaku Usaha	507.160.000		untuk pendukung MPP		300.000.000
2	18	04	2.01	0007		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Tanah Datar	75 Pelaku Usaha	1.800.000				80.000.000
2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Tanah Datar	200 Kegiatan usaha	12.000.000				270.000.000
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan		100%	44.438.400				700.000.000
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota			44.438.400				700.000.000
2	18	05	2.01	0004		Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Tanah Datar	10 Kegiatan Usaha	11.500.000				100.000.000
2	18	05	2.01	0005		Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan	jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan	Tanah Datar	300 Pelaku Usaha					350.000.000
2	18	05	2.01	0006		Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya analisa dan Verifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian	Tanah Datar	120 Kegiatan Usaha	32.938.400				250.000.000
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun		100%	3.000.000				525.000.000
2	18	06	2.01			Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi		2 Kegiatan	3.000.000				525.000.000
2	18	06	2.01	0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan barbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah,dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tanah Datar	2 Dokumen	3.000.000				525.000.000

Batasangkar, Agustus 2025
KORLA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOTA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199301 1005